BUKTI KORESPONDENSI

ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERINDEKS SINTA 3

Judul artikel : Media masih Pilar Demokrasi? (Jurnalisme dan Demokrasi di Bingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur tentang Pemilu 2024)

Jurnal : Communio, Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi, Volume 14(1), 2024, 30 – 45.

Penulis : Theresia Intan Putri Hartiana, Putra Aditya Lapalelo, Nanang Krisdinanto * (koresponden)

Nomor	**Perihal**	**Tanggal**
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disbumit	31 Oktober 202
2.	Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review Pertama	28 November 2024
3.	Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit	10 Desember 20024
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	28 Desember 2024
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	29 Januari 2025

1.Bukti Konfirmasi Submit Artikel
dan Artikel yang Disubmit
(31 Oktober 2024)

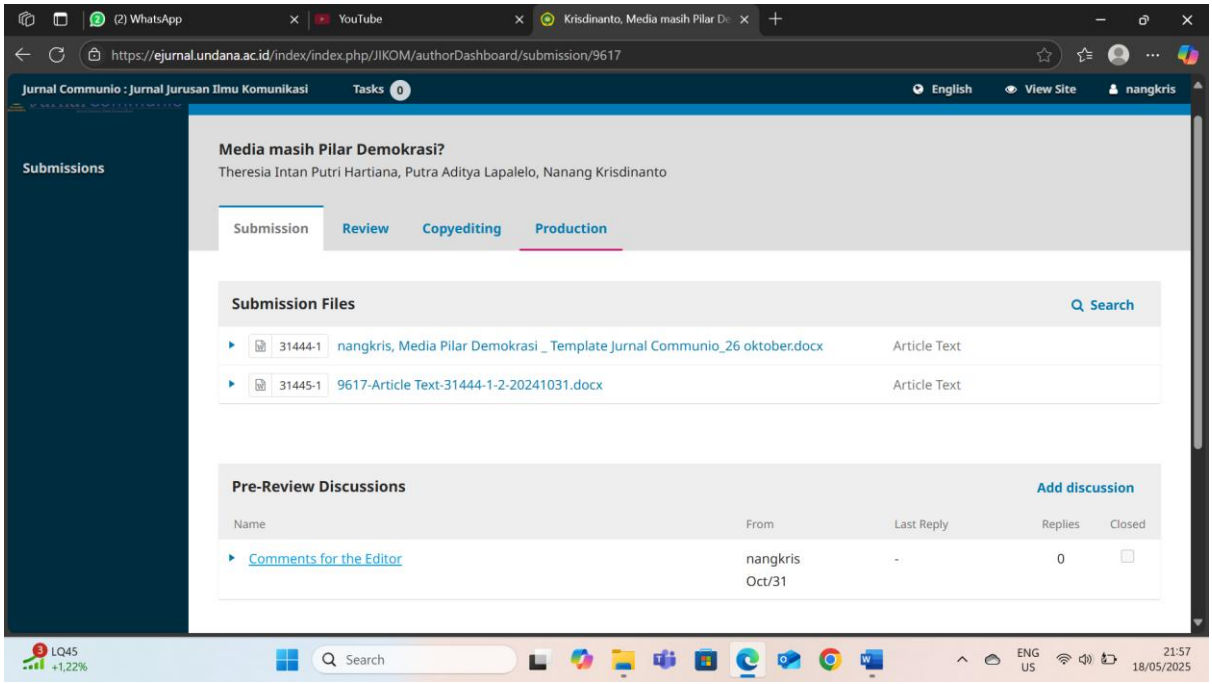

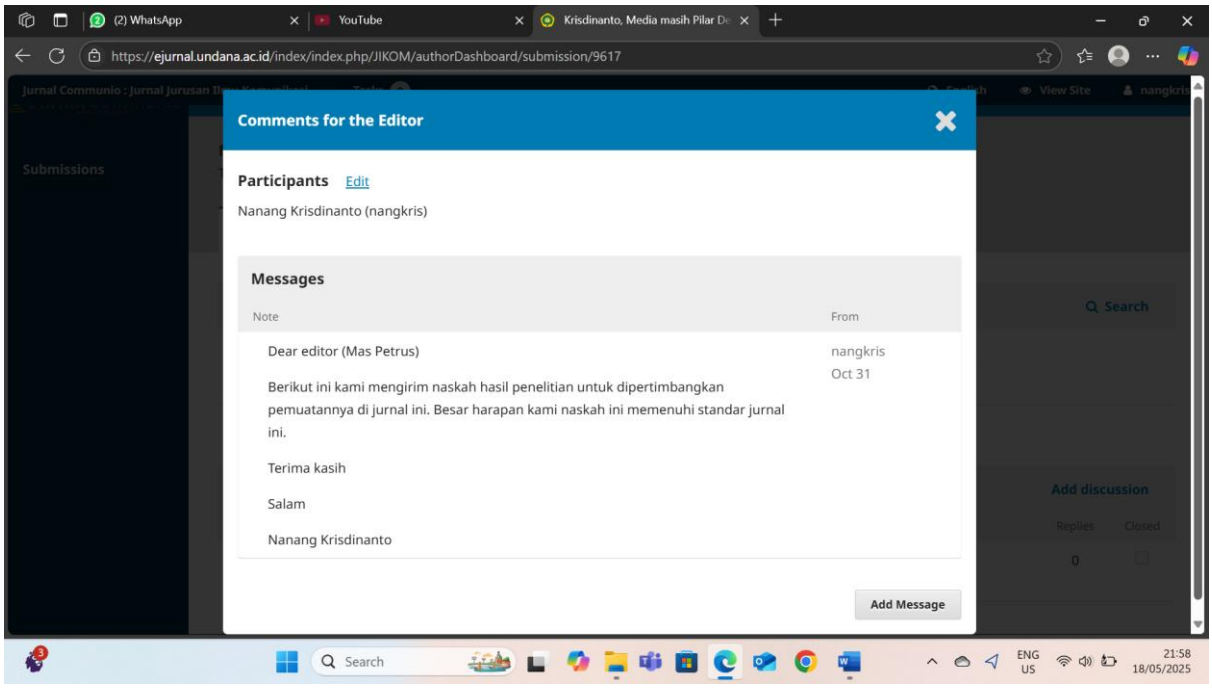

Bukti naskah yang dikirim

Media Masih Pilar Demokrasi ?
(Jurnalisme dan Demokrasi di Bingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur tentang Pemilu 2024)

Theresia Intan Putri Hartiana[1], Putra Aditya Lapalelo[2], dan Nanang Krisdinanto[3*]
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kecurigaan atas perubahan rutinitas dan praktik kerja jurnalistik sebagai akibat dari perubahan teknologi, disrupsi informasi, kemerosotan ekonomi, dan praktik politik-ekonomi media, yang mungkin mempengaruhi peran media sebagai alat kontrol demokrasi. Penelitian ini ingin melihat apakah faktor-faktor pelemahan kerja jurnalistik tersebut mempengaruhi kualitas isi berita media saat proses peliputan berita yang ada hubungannya dengan demokrasi dan kepentingan rakyat. Apa lagi selama ini perspektif jurnalistik menekankan bahwa alat pembingkaian berita milik media harus dijalankan guna tujuan kepentingan umum dan menjaga pilar demokrasi. Mengambil kasus pemberitaan "Pernyataan Sikap Civitas Akademik Jawa Timur tentang Pemilu 2024 oleh 3 portal berita, Jawa Pos, Kompas, dan Detik", dan menggunakan model bingkai Entman, penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran apakah media masih menjalankan perannya sebagai alat kontrol demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media masih meletakkan komponen pembingkaian masing-masing untuk menunjang proses demokrasi, melalui bingkai demokrasi jujur dan adil. Namun peran kontrol demokrasi ini masih sangat berkaitan erat dengan praktik ekonomi-politik media.

Kata-kata Kunci: Jurnalisme; Kontrol Sosial; Demokrasi; Bingkai Berita; Rutinitas Media

Media is still a Pillar of Democracy?
(Journalism and Democracy in the Frame of the News 'Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur')

ABSTRACT

This research is motivated by the suspicion that changes in journalistic work routines and practices as a result of technological change, information disruption, economic downturn, and media political-economic practices, which may affect the role of the media as a democratic control tool. This research wants to see whether these factors of weakening journalistic work affect the quality of media news content during the process of covering news that has to do with democracy and the interests of the people. Journalistic perspectives have emphasised that the media's news framing tools must be implemented for the purpose of public interest and maintaining the pillars of democracy. Taking the case of the news coverage of the 'East Java Academic Community Statement about Election by 3 news portals, Jawa Pos, Kompas, and Detik', and using Entman's framing model, it is hoped that it can provide an overview of whether the media is still carrying out its role as a democratic control tool. The results found that the three media still put their respective framing components to support the democratic process, through the frame of honest and fair democracy. However, the role of democratic control is still closely related to the political-economic practices of the media..

Keywords: *Journalism; Social Control; Democracy; News Frames; Media Routines*

.

Korespondensi: Dr. Nanang Krisdinanto. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jl. Dinoyo 42-44, Keputran, Surabaya **No. HP, WhatsApp: 08123584016** *Email*: nangkris@ukwms.ac.id

PENDAHULUAN

Kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (2024) terasa memanas dan riuh. Dialektika informasi politik di masyarakat, makin bergejolak. Gelombang panas ini, tak luput dari sikap kritis beberapa pihak terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilu 2024 dipandang mencederai nilai – nilai demokrasi dan proses kontestasi politik berlangsung dalam situasi yang adil.

Keprihatinan agar Pemilu 2024 tidak mengalami kemunduran dan mengharap Pemilu damai lantang disuarakan, salah satunya datang dari kalangan akademisi. Gelombang petisi dari sejumlah Perguruan Tinggi dan akademisi bermunculan menyuarakan kegelisahan terhadap demokrasi yang dianggap mulai menyimpang.

Diawali dengan akademisi dari Universitas Gajah Mada lewat petisinya "Petisi Bulaksumur", kemudian berbagai kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan disusul beberapa kampus lainnya. Begitu pula seruan agar Pemilu 2024 berjalan lebih baik, muncul dari akademisi dan perguruan tinggi di Jawa Timur. Beberapa diantaranya Seruan Kebangsaan dari Kampus Merah Putih di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Pernyataan sikap dari Universitas Airlangga, Universitas Jember.

Munculnya beragam seruan situasi Pemilu 2024 di Jawa Timur ini menjadi gambaran bahwa Indonesia sedang sedang tidak baik-baik saja. Terlebih, pengamat politik menilai bahwa wilayah Jawa Timur merupakan barometer dalam pemilihan umum Nasional. (Febrianto 2023). Hal ini bisa diartikan, bahwa situasi Pemilu 2024 di Jawa Timur yang juga ramai, bisa dikatakan cerminan situasi Pemilu 2024 di Indonesia yang juga ramai.

Pernyataan akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang mendorong adanya pemilu damai di Jawa Timut, tentunya tidak lepas dari liputan media.

Gambar. Pemberitaan di kompas.com dan detik.com terkait pernyataan sikap Pemilu 2024

Sumber : (Supriadi 2024) dan (Mulyono 2024)

Seperti terlihat dalam judul gambar di atas, media menampilkan pernyataan sikap Universitas Jember terkait Pemilu dalam sudut pandang berbeda. Kompas melihat bahwa pernyataan sikap mengarah untuk menghentikan politisasi kebijakan yang dilakukan Jokowi. Begitu pula dengan detik.com langsung mengarah pada Pemilu 2024 dipandang sebagai bagian politik dinasti yang dilakukan Jokowi.

Merujuk pada berita di atas, media seringkali secara tidak langsung mengkonstruksi realitas melalui berita yang ditulisnya. Bahasa yang disajikan media merupakan gambaran realitas yang dikonstruksi dan ditampilkan. Penggunaan kata ataupun foto menjadikan memberikan makna atas realitas tersebut. (Rusli, Ahdan, and Idris 2022).

Produk pemberitaan yang ditampilkan menjadi alat menyampaikan kepentingan ideologi dari masing – masing media. framing berita menjadi arena simbolik pihak – pihak yang berkepentingan dalam isu tersebut (Wardani, Suprayitno, and Wahyuningratna 2023).

Peran media dalam pemberitaan Pemilu sangat diperlukan dalam peningkatan demokrasi. Hal ini yang diharapkan mampu mendorong partisipasi publik dalam mencapai konsolidasi demokrasi, yang terwujud dalam partisipasi aktif Pemilu. Sehingga transparansi dan akuntabilitas akan dapat terwujud dengan menghindarkan pada kecurangan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat (Hutomo 2023).

Media menjadi alat kontrol sosial dalam penyelenggaraan Pemilu dalam memberikan informasi kepada publik. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dari tokoh politik dalam Pemilu.

Idealnya media dan wartawan harus mampus menjaga independen untuk menjamin pemberitaan yang lebih objektif.(Prasetyo et al. 2023), Untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar ke-empat, *(fourth estate)* demokrasi, pers punya kewajiban menjaga terselenggaranya pemilu yang sehat.

Namun sayangnya, perkembangan media massa di Indonesia telah mengalami perubahan dari apa yang disebut media perjuangan yang penuh nilai idealis menjadi media komersial yang mengedepankan nilai komersial (Wibawa 2020).

Tudingan keberpihakan media, menjadi semakin nyata dengan masuknya para pemilik media dalam dunia politik Indonesia. Sebut saja Surya Paloh sebagai pimpinan Media Group, yang memiliki jaringan Media Indonesia, Lampung Post, Stasiun Televisi Metro TV, yang sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Kepentingan ekonomi politis menjadi pengkikis netralitas media massa dalam menyampaikan berita.

Sejalan dengan pemikiran Herman dan Chomsky (1988) bahwa kepentingan ekonomi dan politik akan condong untuk menjadi fungsi utama daripada fungsi sosial dan publik. Sebagai sumber pesan utama yang dapat mempengaruhi pemikiran banyak orang, media memiliki kekuatan untuk menentukan proses pembuatan nilai dalam masyarakat. Oleh Castell, nilai dalam kenyataannya dipandang sebagai sebuah ekspresi kekuasaan: media juga memegang kuasa dan oleh sebab itu sungguh menentukan apa yang dianggap (ber)nilai (CIPG 2015).

Penelitian yang menyorot mengenai fungsi media massa sebagai penjaga pilar demokrasi telah dilakukan. Slamet (2016) memaparkan bahwa kedudukan media sebagai penjaga pilar demokrasi dipandang telah melakukan kebohongan publik dalam proses Pemilu, seperti pada Pemilu Presiden di Amerika dan Indonesia dengan memunculkan data manipulatif. Hal ini tidak terlepas media yang dikuasai pemilik modal (Slamet 2016). Lebih lanjut Hariyadi (2018) menyoroti bahwa fungsi media massa, dalam konteks ini MNC Grup dari sebuah nilai guna menjadi di panggung Pilpres 2019 telah menjadi kontestasi nilai tukar atau komodifikasi. Melalui politik kuasa media yang dimilikinya MNC Grup, telah terbukti meruntuhkan pilar demokrasi (Hariyadi 2018).

Hal inilah kemudian yang menjadi sorotan di beberapa penelitian bahwa fungsi keempat pilar demokrasi telah digeser oleh media sosial sebagai pilar kelima Demokrasi. Sumarkidjo (2013) menyatakan kontrol sosial tidak lagi menjadi monopoli utama pers seiring berkembangnya media baru *(new media)* dan media sosial. Media baru dan media sosial inilah yang pada akhirnya menjadikan pendorong mengangkat isu ketidakadilan (Sumarkidjo 2013). Selain itu Lestari (2018) melihat bahwa change.org sebagai media digital dapat digunakan sebagai medium untuk mengakomodir tindakan kolektif warga karena sifatnya yang mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Hal ini memberi kekuatan lebih yang tidak ditemui oleh media massa yang hanya bersifat satu arah (Lestari and Suranto 2018).

Penelitian kali ini ingin kembali menyoroti bagaimana fungsi media massa sebagai pilar keempat demokrasi tetap terjaga khususnya pada Pemilu 2024 dalam membingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur.

Sehingga hasil dari temuan tersebut dapat dipaparkan apakah bingkai yang dihasilkan media karena dilatarbelakangi idealisme ekonomi politik, atau tujuan politis. Selanjutnya dapat terlihat media menjalankan perannya sebagai fungsi pilar demokrasi pada Pemilu 2024, sesuai dengan moralitas kerja jurnalistik, atau media.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis framing, dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam pemberitaan ini adalah pemberitaan terkait pernyataan sikap akademi, Perguruan Tinggi di Jawa Timur yang dimuat dalam kompas.com, detik.com dan jawapos.com. Batas waktu yang digunakan pemberitaan pernyataan sikap akademisi pada media *online* selama kampanye Pemilu 2024, yakni November 2023 – 10 Februari 2024.

Teknik analisis data menggunakan framing Entman dengan fokus pada aspek – aspek :

Tabel 1.Aspek Framing Entman

Aspek framing Etnman	Definisi

Define problem	Realitas dipandang sebagai masalah apa?
Diagnose causes	Komponen sebab akibat, suatu masalah terjadi dikarenakan sebab apa, dan siapa actor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi.
Make moral judgement	Penilaian moral bekerja dalam penyusunan berita, nilai moral apa yang dipakai oleh media untuk mengukuhkan pandangan atau melegitimasi suatu tindakan
Treatment recommendation	Solusi yang ditawarkan media dalam mengatasi masalah yang sudah muncul.

Sumber : (Eriyanto 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu 2024 mengundang banyak perhatian golongan masyarakat, salah satunya sivitas akademika. Beberapa sivitas akademika Perguruan Tinggi menunjukkan sikap atas dinamika yang terjadi. Begitupula dengan kampus – kampus yang terjadi di Jawa Timur turut memberikan pernyataan sikapnya. Media *online* tak luput memberitakan kejadian tersebut. Berikut pemaparan berita yang dituliskan detik.com, kompas.com dan jawapos.com dengan menggunakan aspek framing dari Robert Entman,

Universitas Tujuh Belas Agustus

Pernyataan sikap yang dilakukan oleh Civitas Akademika Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG), diliput oleh Kompas dan Jawapos, keduanya membingkain peristiwa ini sesuai dengan pernyataan sikap yang dikeluarkan Oleh UNTAG, menempatkan hubungan kausalitas antara kerja elit pemerintah dengan problem demokrasi di pemilu 2024. Secara rinci dijabarkan sebagai berikut

Berita Detik.

Berita yang dituliskan oleh detik.com berjudul " Sivitas akademika Untag Surabaya Nyatakan Sikap Tolak Politik Dinasti ". Penonjolan berita yang dituliskan menekankan pada bahwa politik dinasti munculkan intimidasi dan KKN

***Define Problems*.** Berdasarkan analisis perangkat pembingkaian terhadap berita Pernyataan sikap Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) yang diterbitkan oleh Detik.com Masalah dalam peristiwa ini adalah Civitas Akademika Untag menolak politik dinasti. Hal ini tercermati dalam kutipan sebagai berikut.

> "Di bawah pilar panji-panji nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman, dan kreativitas kami, segenap sivitas akademika Untag Surabaya menyatakan menolak politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, *dan nepotisme, menuntut pemerintahan*

yang bersih dan berwibawa, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan," seru rektor Untag saat memimpin pernyataan sikap, Senin (5/2/2024). (Devi 2024)

Diagnose Causes. Dalam perangkat pembingkaian Detik.com, penyebab munculnya masalah penolakan terhadap praktik dinasti politik, disebabkan karena dinasti politik melanggar hukum dan etika dalam pelaksanaan demokrasi, hal ini bisa dicermati dari kutipan berita detik berikut

*"*menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu" (Devi 2024)

Make Moral Judgment untuk menguatkan kausalitas yang telah dibangun, Detik.com membangun penilaian moral bahwa persoalan penolakan dinasti politik berhubungan erat dengan hajat atau kepentingan keadilan publik. Hal ini tercermati dalam kutipan berikut

"Prof Nugroho kemudian menyerukan ajakan untuk masyarakat agar bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, serta mendorong presiden dan para pemimpin menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding pribadi dan golongan."(Devi 2024)

Treatment Recommendation, Rekomendasi yang ditawarkan Detik.com untuk menyelesaikan persoalan ini adalah, dengan cara meletakan kutipan sumber, yang menjelaskan pentingnya penolakan bersama atas segala bentuk *abuse of power*

" kami menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu," ujar dia.

"Menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok, mengembalikan netralitas ASN, TNI, dan Polri," imbuhnya.(Devi 2024)

Tabel 2. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Tujuh Belas Agustus pada Pemilu 2024 di detik.com

Define Problems	Universitas Tujuh Belas Agustus sebagai institusi akademik menolak dinasti politik
Diagnose Causes	Ingin mendorong agar terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Karena politik dinasti memicu munculnya intimidasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Make Moral Judgment	Presiden dan para pemimpin harus menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding pribadi dan golongan
Treatment Recommendation	Seluruh rakyat 8ndonesia untuk menolak praktik politik dinasti dan uang dalam pemilu. Sekaligus menyarankan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegar pada segala bentuk *abuse of power.*
Penolakan Politik Dinasti untuk menghindari Intimidasi dan KKN	

Sumber : (Devi 2024)

Berita Kompas

Kompas.com menayangkan pemberitaan terkait seruan sikap sivitas akademika Universitas Tujuh Belas Agustus dalam bentuk kumpulan foto jurnalistik. Mengambil judul "Politik Dinasti Menyimpang dari Demokrasi"**,** aspek framing Robert Entman dipaparkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Tujub Belas Agustus pada Pemilu 2024 di kompas.com

Define Problems	Universitas Tujuh Belas Agustus menolak politik dinasti dan intimidasi
Diagnose Causes	Pemilu 2024 dianggap keluar jalur demokrasi dan reformasi
Make Moral Judgment	Seruan Kebangsaan
Treatment Recommendation	-
Penolakan Politik Dinasti Menyimpang dari Demokrasi	

Sumber : (Gupta 2024)

Define Problems, yang dipandang Kompas.com sebagai masalah dalam peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika UNTAG adalah Kegundahan Civitas Akademika terhadap bentuk politik dinasti dan intimidasi. Hal ini gtercermati dalam kutipan berita berikut.

> "Perwakilan dosen menyampaikan pernyataan sikap Seruan Kebangsaan Kampus Merah Putih di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). Salah satu seruan dalam pernyataan sikap di Untag adalah menolak politik dinasti dan intimidasi".(Gupta 2024)

***Diagnose Causes*.** Hubungan kausalitas yang Kompas bangun terhadap peristiwa masalah kegundahan civitas akademika terhadap dinasti politik dan intimidasi

juga menyusun Kegiatan penolakan itu terjadi karena Pemilu 2024 tidak sesuai dengan demokrasi dan reformasi

> "Pemilu 2024 dianggap keluar jalur demokrasi dan reformasi".(Gupta 2024)

Make Moral Judgment. Pernyataan sikap tersebut semakin ditekankan sebagi bentuk seruan kebangsaan

> "Seruan Kebangsaan" (Gupta 2024)

Universitas Jember

Pemberitaan atas seruan sikap Universitas, dituliskam detik.com dengan menonjolkan bahwa tindakan pernyataan sikap tersebut sebagai hal untuk menjaga demokrasi dan konstitusi, agar terhindar dari politik dinasti. Hal ini terlihat dari pemaparan aspek framing Robert Entman pada Tabel 4.

Define problem. Berita yang dituliskan detik.com pernyataan sikap Universitas Jember menyatakan permasalahan bahwa pernyataan sikap tersebut sebagai desakan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu untuk menjaga dan menegakkan demokrasi.

"Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Jember (Unej) menyampaikan pernyataan sikap dan seruan moral terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka mendesak seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu menjaga dan menegakkan demokrasi dan konstitusi". (Mulyono 2024)

Diagnose causes. Munculnya desakan tersebut oleh detik.com dituliskan karena ada upaya membangun dinasti politik yang mengakibatkan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Menurut Iqbal, pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun, yang terjadi justru ada indikasi proses pemilu tidak berlangsung secara jujur, adil, bebas dan langsung. Dia menilai saat ini ada upaya-upaya untuk membangun politik dinasti melalui proses pemilu. Sehingga, mencederai asas kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaannya." (Mulyono 2024).

Make moral judgement. Hal tersebut semakin dipertegas detik.com melalui penguatan kausalitas yang dimunculkan dalam tulisan bahwa seharusnya
Pemilu 2024 dapat kembali jujur, adil, bebas dan rahasia.

"Seharusnya memang suatu pesta yang harusnya meriah dan bisa dirasakan bersama oleh seluruh rakyat. Tapi kami seluruh sivitas akademika Jember menyatakan sikap bahwa politik dan pemilu kita saat ini tidak berlangsung secara jujur, adil, bebas, langsung. Tentu sangat mungkin untuk berpengaruh pada prinsip asas rahasia di bilik suara," terang Iqbal." (Mulyono 2024)

"Untuk sama-sama memastikan arah pembangunan, sebagai satu mandat dari kemerdekaan RI ini berlangsung baik dan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi. Ini sebagai satu moral call," tandasnya. (Mulyono 2024)

Treatment recommendation. Rekomendasi yang ditawarkan detik.com untuk menyelesaikan persoalan ini adalah, dengan cara memberikan pernyataan bahwa perlunya dukungan seluruh elemen yang terlibat Pemilu 2024 untuk menjaga jalannya Pemilu dan menegakkan kembali Demokrasi.

"Pihaknya ingin semua elemen bisa memastikan arah pembangunan melalui pemilu yang sehat dan demokratis." (Mulyono 2024)

Tabel 4. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Jember pada Pemilu 2024 di detik.com

Define Problems	Desakan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu untuk menjaga dan menegakkan demokrasi
Diagnose Causes	Upaya membangun dinasti politik yang mengakibatkan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil
Make Moral Judgment	Pemilu tetap bersifat jujur, langsung adil, bebas,rahasia agar sesuai koridor demokrasi dan konstitusi

Treatment Recommendation	
Menjaga demokrasi dan konstitusi, agar terhindar dari politik dinasti	

Sumber : (Mulyono 2024)

Kompas.com dalam pernyatakan sikap yang dilakukan oleh Universitas Jember ditonjolkan menonjolkan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas usaha politisasi Pemilu. Hal ini terlihat dari pemaparan framing Robert Entman dalam Tabel 5.

Define problem. Permasalahan atas kejadian pernyataan sikap Universitas Jember dinyatakan oleh Komps.com sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan civitas akademika Universitas Jember terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap memprihatinkan. Hal tersebut dinyatakan dalam kutips

> "Deklarasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan civitas akademika Unej terhadap proses penyelenggaraan Pemilu *2024."* (Supriadi 2024)

Diagnose causes. Proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap memprihatinkan disebabkan karena usaha politik dinasti yang terjadi pada Pemilu 2024, hal itu trrlihat dari kutipan

> "Ada upaya kepentingan membangun politik dinasti." (Supriadi 2024)

Make moral judgement. untuk menguatkan kausalitas yang telah dibangun, Kompas.com membangun penilaian moral bahwa keprihatinan terkait keprihatinan atas politisasi pemilu akan bisa terhindarkan apabila pemilu berjalan aman damai jujur adil tanpa ada intimidasi

> "Pemilu berjalan aman damai jujur adil tanpa ada intimidasi".(Bagus Supriadi 2024)

Treatment recommendation. Rekomendasi yang ditawarkan Detik.com untuk menyelesaikan persoalan keprihatinan atas politisasi pemilu adalah, pmengajak mengawal jalannya Pemilu yang oleh seluruh masyarakat

> "mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".(Bagus Supriadi 2024)

Tabel 5. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Jember pada Pemilu 2024 di Kompas.com

Define Problems	Bentuk kepedulian dan keprihatinan civitas akademika Universitas Jember terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap memprihatinkan
Diagnose Causes	Adanya kepentingan tertentu untuk membangun dinasti politik
Make Moral Judgement	Pemilu harus berjalan tanpa intimidasi
Treatment Recommendation	Mengawal jalannya Pemilu
Bentuk keprihatinan atas politisasi pemilu	

Sumber : (Supriadi 2024)

Universitas Airlangga

Kompas.com menulis judul pernyatan sikap politik Universitas Airlangga dengan menonjolkan Kecaman pelanggengan politik kekeluargaan sebagai praktik pelemahan demokrasi. Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Jember di kompas.com

Define Problems	Pengecamanan atas segala bentuk praktik pelemahan demokrasi menjelang pemilu 2024.
Diagnose Causes	Merawat etika demokrasi dari penyelewengan kekuasaan dan praktik pelanggengan politik kekeluargaan
Make Moral Judgment	Universitas Airlangga merasa sebagai perguruan tinggi mereka wajib menjaga rasionalitas dan kritisisme untuk menegakkan keadilan, presiden dan aparatur negara lain harus menghormati kebebasan berbicara tiap warga karena negara indonesia milik bersama.
Treatment Recommendation	Memastikan pemilihan dilakukan secara luber jurdil tanpa campur tangan politik dan melindungi kebebasan akademik dan hak-hak sipil warga negara.
Kecaman pelanggengan politik kekeluargaan sebagai praktik pelemahan demokrasi	

Sumber :(Andhi Dwi Setiawan and Kurniati 2024)

Define problem. Permasalahan atas kejadian pernyataan sikap Universitas Airlangga dalam perangkat framing dinyatakan sebagai bentuk pengecaman atas segala bentuk praktik pelemahan demokrasi menjelang pemilu 2024.

> "Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hotman, di depan mahasiswa, Senin (5/2/2024). .(Andhi Dwi Setiawan and Kurniati 2024)

Diagnose causes. Pentingnya pernyataan sikap pengecaman atas segala bentuk praktik pelemahan demokrasi menjelang pemilu 2024 dituliskan Kompas.com karena pentingnya merawat etika demokrasi dari penyelewengan kekuasaan dan praktik pelanggengan politik kekeluargaan yang terjadi.

> Lalu) menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan," tambahnya.(Andhi Dwi Setiawan and Kurniati 2024)

Make moral judgement. Untuk menguatkan kausalitas yang telah dibangun, Kompas.com menekankan dalam berita agar presiden dan aparatur negara lainya untuk menghormati kemerdekaan hak warga negara.

> "Unair mendesak presiden dan aparatur negara lainya untuk menghormati kemerdekaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi tiap warga. "(Menghormati) kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam. Karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa," jelasnya."(Andhi Dwi Setiawan and Kurniati 2024)

Treatment recommendation. Rekomendasi yang ditawarkan atas permasalahan praktik pelemahan demokrasi menjelang pemilu 2024 adalah dengan memastikan pemilihan dilakukan secara luber jurdil tanpa campur tangan politik dan melindungi kebebasan akademik dan hak-hak sipil warga negara tanpa intervensi.

> "Selanjutnya, kata Hotman, pemerintah diminta untuk menggelar Pemilu dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta tanpa adanya praktik politik uang. "Mendesak penyelenggaraan Pemilu tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara yang dilakukan oleh peserta Pemilu," ucapnya. Terakhir, Hotman dalam pernyataan sikapnya menyinggung perihal tekanan yang diterima oleh para akademisi. Hal itu diduga dialami setelah memberikan kritik kepada pemerintahan sekarang."(Andhi Dwi Setiawan and Kurniati 2024)

Jawapos.com

Menulis artikel dengan judul Aksi Unair Memanggil, Tujuh Guru Besar Turun Gunung di Surabaya, jawapos.com menonjolkan peristiwa pernyataan sikap Universitas Airlangga sebagai respon atas praktik pelanggengan politik kekeluargaan jelang Pemilu 2024 oleh Presiden. Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 6. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Airlangga pada Pemilu 2024 di jawapos.com

Define Problems	Respon atas demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai hancur
Diagnose Causes	praktik – praktik pelanggengan politik kekeluargaan
Make Moral Judgment	Kemerdekaan Indonesia di segala bidang adalah mili rakyat Indonesia
Treatment Recommendation	Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan rahasia
Respon atas praktik pelanggengan politik kekeluargaan jelang Pemilu 2024 oleh Presiden	

Sumber : (Aprianto 2024)

Define problem. Permasalahan yang dituliskan atas kejadian pernyataan sikap Universitas Airlangga terkait Pemilu 2024 oleh detik.com sebagai respon atas demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai hancur

> "Tujuh guru besar dan puluhan akademisi Universitas Airlangga (Unair) mengikuti aksi Unair Memanggil di halaman Sekolah Pasca Sarjana Unair, Senin (5/2). Aksi terbuka itu menyoroti kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai hancur".(Aprianto 2024)

Diagnose causes. Demokrasi dalam Pemilu 2024 dikatakan hancur disebabkan karena munculnya praktik – praktik pelanggengan politik kekeluargaan

> "Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara agar merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan serta menghentikan upaya melanggengkan politik kekeluargaan"(Aprianto 2024)

Make moral judgement. Untuk menguatkan kausalitas yang telah dibangun oleh Jawapos.com dinyatakan dalam berita bahwa kemerdekaan disegala aspek adalah milik semua rakyat

> "kemerdekaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, masyarakat sipil dijamin negara. Indonesia milik semua rakyat, bukan milik kelompok atau golongan tertentu"(Aprianto 2024)

Treatment recommendation. Rekomendasi yang yang ditawarkan oleh Jawapos.com atas demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai hancur

> "Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, para akademisi, keluarga besar, dan alumni Unair Surabaya, mendesak supaya penyelenggara bersikap adil, tidak berbuat curang serta tanpa kekerasan".(Aprianto 2024)

Detik.com

Detik.com menonjolkan peristiwa pernyataan sikap Universitas Airlangga Sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan kukuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Airlangga pada Pemilu 2024 di detik.com

Define Problems	Mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo
Diagnose Causes	penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara, demi kepentingan politik partisan elektoral
Make Moral Judgment	Presiden harus memberi teladan dengan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
Treatment Recommendation	

Sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan kukuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi

Sumber : (Widiyana 2024a)

Define problem. Permasalahan atas peristiwa pernyataan sikap Universitas Airlangga terkait Pemilu 2024 dituliskan detik.com sebagai bentuk mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo

> "Sivitas akademika Universitas Airlangga (Unair) menyampaikan pernyataan sikap mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan situasi demokrasi saat ini. Ada 120 orang yang ikut dalam kegiatan ini." (Widiyana 2024a)

Diagnose causes. Bentuk mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo disebabkan karena penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara, demi kepentingan politik partisan elektoral.

> "Pelencengan terhadap prinsip republik yang terjadi beberapa waktu terakhir. Apalagi, hal ini terjadi untuk kepentingan kekuasaan. Prof Hotman juga menyoroti adanya indikasi penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara, demi kepentingan politik partisan elektoral." (Widiyana 2024a)

Make moral judgement.

Bentuk kritis tersebut dipertegas detik.com dengan nilai moral yang ditekankan dalam berita bahwa Presiden harus memberi teladan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

> "Tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara, memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan personal apapun tujuan dan caranya." (Widiyana 2024a)

> "Hal ini menunjukkan ketidakadaan teladan etis republik yang seharusnya dicontohkan oleh pemimpin republik," imbuh Prof Hotman". presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN." (Widiyana 2024a)

Treatment recommendation. Rekomendasi yang yang ditawarkan oleh detik.com atas sikap mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo, dengan menuliskan

> "Menurutnya Prof. Hotman, saat akan mengakhiri pemerintahannya, Jokowi seharusnya mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut." (Widiyana 2024a)

Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Pernyataan sikap Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya dilaporkan sebagai berita oleh Kompas.com, dan Detik.com. secara umum kedua media masih membingkai pentingnya netralitas pemilu, namun Kompas tampaknya meletakan hubungan kausalitas antara pemilu yang tidak netral dengan intervensi dan ketidak-netralan pemerintah saat pemilu 2024. Secara lengkap dilaporkan sebagai berikut.

Kompas.com

Kompas.com menulis peristiwa pernyatan sikap politik Universitas Negeri Surabaya dengan menonjolkan bahwa peristiwa tersebut sebagai menjaga pemilu sesuai koridor etik dan

demokrasi Sehat, hal ini karena ada kecurigaan bahwa ada pihak pemegang kekuasaan yang mengintervensi pemilu. Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya pada Pemilu 2024 di kompas.com

Define Problems	Tanggung jawab moral dunia Pendidikan mencegah pemilu yang tidak netral.
Diagnose Causes	Kecurigaan pemerintah tidak netral, dan mengintervensi di pemilu 2024
Make Moral Judgement	Tetap pada koridor etik, aturan, demokrasi yang sehat
Treatment Recommendation	Agar seluruh pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab supaya bisa berlangsung dengan damai, aman, serta jujur dan adil
Menjaga Pemilu sesuai Koridor Etik dan Demokrasi Sehat	

Sumber : (Andhi Dwi Setiawan 2024)

Define problem. Dalam perspektif Kompas masalah dalam peristiwa Pernyataan sikap sivitas akademika UNESA adalah Civitas akademika melihat peran dan tanggung jawab moral akademis menghadapi tidak-netralan pemilu 2024. Hal ini bisa dicermati dalam teks berikut.

> "Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Unesa, Dr Martadi mengatakan, pernyataan sikap itu merupakan tanggung jawab moral di dunia pendidikan." (Setiawan 2024)

Diagnose causes. Oleh Kompas.com alasan utama masalah dia atas muncul disebabkan karena kecurigaan pemerintah tidak netral dalam pemilu 2024. Hal ini bisa dicermati dalam teks berikut.

> "Martadi menyebutkan, deklarasi tersebut juga untuk mengingatkan bahwa pemilihan umum (Pemilu) yang digelar, Rabu (14/2/2024) mendatang, bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kata Martadi, setiap elemen pemerintahan sudah seharusnya menjaga netralitas selama berlangsungnya pesta demokrasi. Dengan demikian, Pemilu dapat berjalan adil." (Setiawan 2024)

Make moral judgement. Nilai moral yang ditekankan dalam berita ditunjukkan dengan menuliskan bahwa masalah tidak netralan pemerintah adalah masalah yang berhubungan dengan koridor etik, aturan, demokrasi yang sehat, hal ini bisa dicermati dalam teks berita Kompas.com berikut.

> "Kita semua harus tetap pada koridor etik, aturan, demokrasi yang sehat, sehingga bangsa kita ini tetap bisa utuh. Lalu Pemilu melahirkan pemimpin yang membawa bangsa ini ke kemakmuran," ujarnya. (Setiawan 2024)

Treatment recommendation. Rekomendasi yang yang ditawarkan oleh kompas.com atas pernyataan sikap tersebut dengan agar seluruh pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab supaya bisa berlangsung dengan damai, aman, serta jujur dan adil.

> "Martadi kembali menekankan, agar seluruh pihak yang terlibat dalam berlangsungnya Pemilu, untuk bertanggung jawab supaya bisa berlangsung dengan damai, aman, serta jujur dan adil. (Andhi Dwi Setiawan 2024)

Detik.com

Detik.com menulis peristiwa pernyatan sikap politik Universitas Negeri Surabaya dengan menonjolkan bahwa sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya pada Pemilu 2024 di detik.com

Define Problems	Keutuhan NKRI perlu dijaga
Diagnose Causes	sivitas akademika yang menjadi moral force
Make Moral Judgement	memecah persatuan dan kesatuan
Treatment Recommendation	Kebebasan akademik
Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	

Sumber : (Widiyana 2024b)

Define problem. Detik melihat masalah dari peristiwa pernyataan sikap Universitas Negeri Surabaya adalah terdapat kerentanan dalam bernegara, keutuhan NKRI perlu dijaga, untuk itu akademisi perlu menjadi penjaga demokrasi. Hal ini bisa dicermati dari kutipan berita berikut.

> "Mencermati dinamika politik nasional pada proses pemilihan umum 2024 dan untuk mengawal tegaknya demokrasi, serta menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2024". (Widiyana 2024b)

Diagnose causes. Peristiwa pernyataan sikap Universitas Negeri Surabaya disebabkan karena problem moral yang menghantui berjalannya proses demokrasi saat ini.

> "Martadi mengatakan, pihaknya sebagai sivitas akademika yang menjadi moral force untuk keberlangsungan bangsa ingin berkontribusi untuk menjaga dinamika politik saat ini. Mereka tidak ingin terjadi perpecahan dan konflik." (Widiyana 2024b)

Make moral judgement. nilai moral yang ditekankan dalam berita adalah moralitas berdemokrasi punya implikasi besar terhadap kesejahteraan, keadilan, dan keutuhan masyarakat dan negara. Hal ini bisa dicermati dalam kutipan berikut

> "Kalau dibiarkan akan berpotensi memecah persatuan dan kesatuan, maka tugas kita adalah ikut berkontribusi, ikut memberikan spirit moral agar mengingatkan semua komponen

bangsa bahwa pemilu bukan segalanya. Gol akhir dari pemilu adalah menciptakan NKRI yang adil, sejahtera untuk masyarakat kita," ujarnya. (Widiyana 2024b)

Treatment recommendation. solusi yang ditawarkan oleh Detik.com dengan mengutip pernyataan sikap adalah mengedepankan kebebasan akademik untuk mendorong demokrasi yang adil. Hal ini bisa dicermati dalam kutipan berita berikut.

"Maka, kami hari ini memanfaatkan kebebasan akademik yang dijamin UU itu untuk memberikan pesan moral kepada semua pihak agar kita tetap ingin, tetap terjaga kebersamaan, tetap menjaga persaudaraan, jangan sampai kemudian hanya dengan pemilu, menimbulkan perpecahan antar elemen, antar anak bangsa ini. (Widiyana 2024b)

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Selain itu terdapat kampus di Jawa Timur yang mendeklarasikan pernyataan sikap terkait Pemilu 2024 melalui asosiasi atau organisasi. Seperti Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang mendekralasikan melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK)

Kompas.com

Kompas.com menulis peristiwa pernyatan sikap politik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan menonjolkan bahwa peristiwa tersebut sebagai deklarasi Pemilu damai. Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada Pemilu 2024 di kompas.com

Define Problems	Presiden sebagai pemimpin negara harus taat kepada sumpah jabatan
Diagnose Causes	Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang menyimpang
Make Moral Judgement	mampu menjunjung tinggi etika dalam bekerja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Treatment Recommendation	Bersama menjaga Pemilu 2024 berkualitas, bermartabat, jujur dan adil
Seruan atas penyimpangan yang dilakukan Jokowi sebagai Kepala Negara	

Sumber : (Wiryono 2024)

Define problem. Kompas.com memamndang bahwa Permasalahan atas peristiwa pernyataan sikap Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, adalah akademisi perlu bersuara karena pemerintah, termasuk presiden republik Indonesia dicurigai tidak taat hukum.

“Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) meminta agar Presiden Joko Widodo berpegang teguh pada sumpah jabatan sebagai presiden”.

Diagnose causes. Dalam perspektif Kompas.com **masalah dalam** Peristiwa pernyataan sikap Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya disebabkan oleh munculnya intervensi pemerintah terhadap Pemilu 2024, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses demokrasi.

“Desakan ini, kata Sri, dibuat atas dasar keresahan dan kondisi tatanan hukum dan demokrasi yang semakin mengkhawatirkan jelang Pemilu 2024 nanti. "Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia," ucap Sri. (Wiryono 2024)

Make moral judgement. nilai moral yang ditekankan dalam berita ditunjukkan dengan menuliskan bahwa problem pemerintah/presiden tidak taat hukum adalah problem moral sebagai pemimpin.

“Asosiasi yang beranggotakan rektor dan ketua perguruan tinggi katolik ini juga mendesak agar Jokowi mampu menjunjung tinggi etika dalam bekerja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.” (Wiryono 2024)

Treatment recommendation. solusi yang ditawarkan atas pernyataan sikap tersebut dengan menggaungkan kebersamaan perihal menjaga demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil tanpa intervensi kekuasaan.

"Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil," tandasnya.” (Wiryono 2024)

Detik.com

Detik.com menulis peristiwa pernyatan sikap politik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan menonjolkan Sikap menjaga Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil Hal ini terlihat dari pemaparan berita berdasarkan aspek framing menurut Robert Entman pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Aspek Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada Pemilu 2024 di detik.com

Define Problems	Pentingnya Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil
Diagnose Causes	rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia jelang Pemilu 2024.
Make Moral Judgment	Praktik penyalahgunaan kekuasaan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara

Treatment Recommendation	Keterlibatan semua Perguruan Tinggi di Indonesia dalam pemantauan Pemilu 2024
Sikap menjaga Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil	

Sumber : (Jumbadi 2024)

Define problem. Dalam perspektif Detik.com Permasalahan atas kejadian pernyataan sikap Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah pentingnya Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil

> "Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) menyatakan sikap kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Mereka menyerukan Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil". (Jumbadi 2024)

Diagnose causes. Detik.com melihat munculnya masalah dalam Pernyataan sikap Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya disebabkan rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia jelang Pemilu 2024.

> "Kami pada rektor Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia jelang Pemilu 2024," ujar Sri Nurhatanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Sabtu (3/2/2024). (Jumbadi 2024)\\

Make moral judgement. Detik.com Dipertegas dengan nilai moral yang ditekankan dalam berita terkait praktik penyalahgunaan kekuasaan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara

> "Praktik penyalahgunaan kekuasaan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil". (Jumbadi 2024)

Treatment recommendation solusi yang ditawarkan atas pernyataan sikap tersebut adalah mengupayakan kontrol masyarakat pada proses pemilu.

> "Semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum". (Jumbadi 2024)

Dari hasil pemaparan berita Pernyataan Sikap Perguruan Tinggi berdasarkan aspek framing Robert Entman, didapatkan hasil,sebagai berikut

Tabel 12. Framing keseluruhan Pemberitaan pernyataan **Pemberitaan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika pada Pemilu 2024**

Kampus	Kompas	Detik	Jawa Pos
Universitas 17 Agustus	**Penolakan Politik Dinasti Menyimpang dari Demokrasi**	Penolakan Politik Dinasti untuk menghindari Intimidasi dan KKN	-
Universitas Jember	Bentuk keprihatinan	Sikap kritis terhadap Presiden Joko	Respon atas praktik

	atas politisasi pemilu	Widodo dalam pemanfaatan kukuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi	pelanggengan politik kekeluargaan jelang Pemilu 2024 oleh Presiden
Univeritas Airlangga	Kecaman pelanggengan politik kekeluargaan sebagai praktik pelemahan demokrasi	Sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan kukuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi	Pemilu harus menjadi peristiwa Demokrasi yang bermartabat
Universitas Negeri Surabaya	Menjaga Pemilu sesuai Koridor Etik dan Demokrasi Sehat	Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Seruan atas penyimpangan yang dilakukan Jokowi sebagai Kepala Negara	Sikap menjaga Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil	

Sumber : olahan peneliti

DISKUSI HASIL DAN KAJIAN

Era baru media mengontrol demokrasi: etik, idealisme, dan ekonomi politik media dan pengaruhnya terhadap fungsi kontrol demokrasi media.

Jurnalistik ada untuk menjaga demokrasi telah menjadi gagasan yang dipertukarkan oleh para pelaku media dan setiap individu jurnalis, hingga menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Di negara-negara yang menganut system demokrasi termasuk Indonesia, gagasan ini tidak hanya ada dalam buku, namun telah diimplementasikan dalam praktik-praktik jurnalistik dan menjadi satu dengan sejarah perkembangan negara.

Banyak ahli yang menjelaskan bagaimana keterlibatan kegiatan jurnalistik dengan proses demokrasi, mulai dari memberikan banyak sudut pandang informasi yang membantu masyarakat menimbang sebuah proses demokrasi, hingga menjaga elit penguasa mengedalikan proses demokrasi (Wolfgang, Vos, and Kelling 2019; Wolfgang et al. 2021; Waisbord 2018). Hal ini juga terlihat dalam proses politik di Indonesia, Dari jaman memperjuangkan kemerdekaan, orde baru, reformasi, hingga jaman mempertahankan demokrasi (saat ini) gagasan jurnalistik sebagai pilar penjaga demokrasi telah membantu transformasi dan transisi pemerintahan. Jurnalistik telah menghubungkan aktor penggerak dengan masyarakatnya, pemerintah dengan rakyatnya, termasuk mendorong rakyat melawan tiraninya.

Banyak ahli telah menyebutkan saat sebuah peristiwa berhubungan dengan kepentingan rakyat maka Media dan jurnalis adalah sahabat sejati masyarakat. (Yamamoto 2011; Hallin 2005; Wolfgang et al. 2021; Wolfgang, Vos, and Kelling 2019; Waisbord 2018). Jurnalis tidak hanya mengiformasikan peristiwa namun juga berada dipihak masyarakat mendorong agar peristiwa demokrasi harus menguntungkan rakyatnya, memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan koridor, Dimana kepentingan rakyat menjadi yang utama.

Namun gagasan idealis ini mendapat tantangan akhir-akhir ini, perubahan teknologi yang mendorong distribusi informasi secara massif dan tidak terkontrol telah menjadi tantangan yang rumit bagi kegiatan jurnalistik. Sosial media dan mikrobloging telah mendorong informasi harus diproduksi dan didistribusikan secara cepat, massif dan tanpa standr verifikasi yang mumpuni, sehingga acap kali informasi yang disebarkan punya potensi sebagai informasi palsu.

Disisi lain karena faktor kerja profesional jurnalistik media, Dimana terdapat proses kerja jurnalis wartawan, hingga seleksi redaksi, membuat produk jurnalistik sering kali kalah cepat dibandingkan informasi yang tersebar di platform daring. Disisi lain mempercepat kerja jurnalistik untuk mengikuti perkembangan zaman, berarti juga beresiko menurunkan kualitas verifikasi media (kejadian yang sering terjadi di karya jurnalistik yang tebit di portal berita maupun sosial media). Hal ini menjadi tantangan yang rumit karena menguji bagaimana peran jurnalistik menjaga kebenaran informasi ditengah serangan informasi palsu.

Juarez Miro & Anderson (2024) menjelaskan bahwa distribusi informasi palsu di sosial media dan platform daring lainnya telah menjadi tantangan bagi kegiatan jurnalistik, karena tidak hanya merusak fondasi demokrasi, merusak ekosistem informasi, namun juga

menurunkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap produk pers. Disatu sisi Jurnalistik harus terferivikasi, harus melalui proses-proses liputan dan standar etik, dan di satu sisi harus netral dari kegiatan kapital/ekonomi. Semua itu butuh proses manusia yang membuat prosesnya menjadi lebih lamban dibandingkan yang lain.

Disisi lain kegiatan jurnalistik mendapat tantangan karena masyarakat lebih bergantung kepada sosial media untuk memperoleh informasi (Carter and Shields 2020; Beckerle, Finston, and Sussman 2020). Hal ini menjadi problematik, meskipun sosial media mampu menghadirkan informasi dalam detik, terdapat keraguan terhadap kebenaran informasi yang diterbitkan sosial media. Ini karena seringkali sosial media tidak menjalankan verifikasi informasi, tidak menjalankan standar etik distribusi informasi yang baik, seperti yang dilakukan oleh pers.

Namun sosial media sebagai sumber informasi lazim masyarakat moderen saat ini tidak lepas dari, distribusi cepat dan berbiaya murah bahkan gratis. Informasi yang disebarkan di sosial media kebanyakan bersifat voluntir karena dilakukan oleh audiens (citizen journalist) yang menyebarkan informasi dengan tendensi personal. Hal ini telah memaksa banyak Perusahaan media pers telah mengubah model bisnis mereka untuk bisa kompetitif di era disrupsi informasi ini. Perubahan model bisnis ini telah ditakuti akan memicu perubahan standar kualitas peliputan berita. Standar etik kerja individu wartawan, rutinitas kerja, pola kerja media dan extra media, hingga perubahan teknologi telah disinyalir mengubah jurnalis yang idealis dan otonom menjadi jurnalis yang bias.

Vos, Eichholz, and Karaliova (2019) telah melaporkan kekahwatiran ini dalam penelitian jurnalistik yang mereka kaji, merosotnya ekonomi jurnalistik dalam dekade terakhir akibat masifnya perubahan teknologi komunikasi dan informasi, telah memberi ketakutan kepada media dan jurnalis, karena godaan ekonomi, bisa memaksa terciptanya produk jurnalistik sensasional dan bias, untuk memenuhi “rasa haus dan selera” sensasional audiens. Kemunculan berita yang klik bait, berita yang ditulis sensasional, dan topik berita yang diliput hanya karena populer disosial media, membuat kerja jurnalis yang otonom, independent, dan bebas intervensi mulai terusik.

Apalagi berita di portal berita tidaklah sama dengan berita Panjang yang dulu di tulis di media-media konvensional, berita di portal media dan sosial media cenderung lebih ringkas, lebih cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan standar jurnalistik tidak diterapkan semestinya dalam penulisannya. Ahli jurnalistik telah meragukan idealisme, akurasi, kredibilitas berita, akibat kerja jurnalis yang dituntut cepat untuk memproduksi dan menyebarkan berita di kanal online (Pratiwi and Ambardi 2020; Emeraldien, Sugihartati, and Rahayu 2021).

Apalagi persaingan media jurnalistik portal dan media jurnalistik sosial media jauh lebih ketat dari yang dibayangkan, data Asosiasi media Cyber, dewan pers, dan menkominfo menyebutkan pada tahun 2024 kurang lebih terdapat 40-50 ribu ribu portal yang menyatakan dirinya sebagai portal berita, dan sekitas 1000+ yang tercatat di dewan pers (Dewan Pers and UMN 2024; Haryanto and AMSI 2021). Hal ini memicu persaingan usaha jurnalistik secara ekonomi menantang. Beberapa ahli bahkan menyebutkan bahwa kekahwatiran mereka tentang runtuhnya garis api antara kerja redaksional berita dan ekonomi media dalam proses pembuatan berita (Widyanningtyas 2022). Berita yang mengincar judul fantastis demi clik bait, berita yang tidak menjalankan verifikasi narasumber karena ingin diterbitkan lebih awal, dan ketergantungan media terhadap “model revisi berita” yang dimungkinkan karena perkembangan teknologi. Memicu kualitas jurnalistik dianggap menurun dalam dekade terakhir. Menurunnya kualitas jurnalistik ini pada akhirnya ditakutkan akan mempengaruhi performa karya jurnalistik sebagai pilar demokrasi, karena melemahnya sifat otonom, independen, dan bebas intervensi dari jurnalis dan media.

Tidak hanya persoalan ekonomi, tantangan lain kegiatan jurnalistik di Indonesia muncul karena konglomerasi dan kepemlilikan media. Kesadaran elit akan pentingnya kegiatan jurnalistik dalam mempengaruhi persepsi masyarakat, telah mendorong konglomerasi media oleh para aktor politik. Sebagian media-media yang punya nama telah dicurigai oleh banyak ahli memuat kepentingan politik pemilik media.

Beberapa media jurnalistik baik yang konvensional maupun yang digital internet dimiliki oleh mereka yang terlibat secara aktif dalam perpolitikan Indonesia (Pembayun 2015; Hawa Shofurani 2024; Hariyadi 2018). Beberapa elit partai politik memiliki media massa sebut saja Surya Paloh, Hary Tanoe Soedibjo, Eric Tohir, Aburizal Bakrie, dalah beberapa konlomerat dan politisi yang punya media brand besar yang ada di Indonesia. Peristiwa politik pada Pilpres 2014 dan 2019 telah menjadi Sejarah dan kisah bagaimana media massa yang tujuannya adalah melindungi kepentingan rakyat digunakan untuk mendukung elit politik dalam pemilu.

Dengan menimbang kembali berbagai perspektif jurnalistik yang telah disebutkan di atas, maka pertanyaan yang mengemuka apakah media massa saat ini masih menjalankan fungsi kontrol sosial?. Bagaimana konlomerasi, perkembangan teknologi, politik dan ekonomi media membawa media menjalankan peran dan fungsinya menjaga demokrasi menjadi hal yang perlu didiskusikan secara serius.

Peristiwa demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 mungkin menjadi sampel yang bagus untuk melihat bagaimana kinerja media di Indonesia dalam peranannya menjadi kontrol terhadap demokrasi. Secara spesifik peristiwa kelompok civitas akademika menyampaikan kegelisahan mereka mengenai praktik-praktik demokrasi, dan bagaimana media meliput hal tersebut bisa menjadi kunci untuk mengamati peranan media saat ini. Penelitian ini mengamati bagaimana beberapa media massa memberitakan pernyataan Civitas Akademika di Jawa Timur dan membedahnya dengan perangkat Framing Entman, untuk mendapat data bagaimana media mengambil perspektif terhadap peristiwa tersebut.

Hasil pengelompokan data dengan model Entman, menghasilkan beberapa pola dalam kerja media memberitakan peristiwa Pernyataan Civitas Akademika Jawa Timur. Pola pertama adalah “media tidak berpihak” media melaporkan peristiwa sesuai dengan temuan jurnalis dilapangan, komponen pembingkaian disusun agar fokus pada peristiwa Pernyataan Civitas Akademika. Kausalitas peristiwa dikembalikan kepada pemikiran umum.

Dalam hal ini media seperti Detik.com yang semua komponen pembingkaian (Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation) pada beberapa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, tidak konsisten. Secara rinci peristiwa Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur yang dilaporkan detik menghasilkan pertama bingkai umum bahwa politik dinasti punya dampak serius terhadap demokrasi (Universitas 17 Agustus) , yang kedua bingkai bahwa Jokowi yang menjalankan politik kekeluargaan sebagai penyebab kegagalan Demokrasi (Universitas Jember, Univeritas Airlangga), namun dua peristiwa terakhir dibingkai secara umum bahwa problem demokrasi adalah ketidak jujuran dan politik perlu dijalankan secara damai, tanpa meletakan problem pada pemerintah berkuasa saat ini (Universitas Negeri Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya).

Dengan membaca bingkai secara menyeluruh Peristiwa Pernyataan Sikap Civitas Akademika yang dilaporkan Detik, Detik tampaknya tidak menghubungkan antara ke lima peristiwa dan melaporkannya secara terpisah, hasil pembingkaian yang dilakukan detik termasuk bagaimana peletakan pemerintah atau tidak meletakan pemerintah sebagai penyebab problem demokrasi di Pemilu 2024, sesuai dengan pernyataan sikap yang dilangsungkan oleh masing-masing Kampus. Universitas Jember dan Universitas Airlangga yang dalam pernyataan sikapnya menyalahkan pemerintah sebagai penyebab problem demokrasi di pemilu 2024,

termasuk menyampaikan istilah dinasti politik, dikutip dan dijadikan materi berita oleh detik yang kemudian melahirkan bingkai Politik Dinasti.

disisi lain dua pernyataan kampus (universitas negeri Surabaya dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya) yang menekankan pemilu damai dan tanpa menargetkan langsung pemerintah berkuasa secara langsung, juga dilaporkan serupa oleh detik, hasilnya adalah bingkai berita pemilu damai tanpa menempatkan pemerintah berkuasa sebagai penyebab permasalahan demokrasi di pemilu 2024.

Pola kedua adalah "media berpihak," media melaporkan peristiwa Pernyataan Civitas Akademika Jawa Timur, dengan memberi penekanan pada pokok-pokok peristiwa sehingga memunculkan kesan pengaruh dan dampak. Dalam hal ini media Seperti Kompas, yang semua komponen pembingkaian (Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation) menitik beratkan pada "dinasti politik" sebuah kode keberpihakan karena meletakan pemerintah sebagai pihak yang melanggar proses demokrasi dan membela peristiwa pernyataan Civitas Akademika Jawa Timur, sebagai proses melawan ketidak-adilan dalam proses demokrasi. Konsistensi ini dapat dicermati dari cara bagaimana Kompas membangun bingkai pada 5 peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, yang semuanya menekankan kesalahan pemerintah dalam membangun politik dinasti, yang kemudian menciptakan kegagalan dalam menjalankan demokrasi.

Jawapos berdasarkan hasil analisis data dengan metode Framing Entman juga menampilkan hasil yang serupa dengan media Kompas. Berdasarkan hasil menganalisis 4 komponen pembingkaian Entman pada berita Jawapos mengenai peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, ditemukan bahwa Jawapos menempatkan pemerintah berkuasa saat ini sebagai penyebab utama problematika demokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda dengan Kompas yang meliput 5 peristiwa Pernyataan sikap Civitas Akademika di Jawa Timur, Jawapos hanya meliput dua kasus, yakni Pernyataan sikap Civitas Akademika di Jawa Timur yang dilakukan oleh Kampus di Jember dan Pernyataan sikap Civitas Akademika di Jawa Timur oleh Universitas Airlangga Surabaya.

Hasil analisis bingkai ketiga media terhadap peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, juga melahirkan beberapa perspektif temuan. Meskipun ketiga media mengambil sudut pandang berbeda mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap problem Pemilu 2024. Dimana Jawa Pos mencoba mengambil posisi bahwa semua partisan harus bertanggung jawab menghadirkan pemilu Jujur dan adil (Jurdil), sedangkan Kompas dan Jawapos menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang perlu bertanggun jawab terhadap masalah pemilu 2024.

Hal yang sama dari ketiga media adalah peranan mereka untuk memastikan Pemilu 2024 dijalankan secara Jurdil. Hasil ini sekaaligus menjawa pertanyaan apakah media masih menjaga dirinya sebagai pilar demokrasi, atau agen kontrol sosial ?, dan jawabannya adalah media yang secara umum tunduk dalam sistem aturan dan organisasi jurnalistik masih menjalankan perannya sebagai alat kontrol terhadap proses demokrasi. Ketiga sample media yang dipakai untuk analisis ini menunjukan konsistensi menjaga demokrasi dalam lima peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur yang mereka beritakan. Ketiga media sama-sama menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil di Pemilu 2024.

Namun, mencermati hasil analisa pembingkaian ketiga media yang berbeda mengenai bagaimana problem demokrasi terjadi di pemilu 2024, Dimana Detik menyesuaikan sumber berita, sedangkan Kompas dan Jawapos membangun komponen pembingkaian untuk meletakan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat. Bisa dikatakan terdapat faktor lain yang mempengaruhi cara media menjalankan prinsip kontrol sosial.

Menganalisis lebih jauh mengenai hal tersebut membutuhkan metode pengumpulan dan analisis data yang lain, yang belum bisa disediakan dalam penelitian ini, Oleh shoemaker

dan Reese ada lima komponen yang perlu diperhatikan ketika ingin menggali bagaimana cara manajemen media bekerja dalam memberitakan peristiwa, kelimanya adalah data pola kerja individu wartawan, data rutunitas kerja dan hubungan antara individu, data tata Kelola media, data hubungan media dengan organisasi lain diluar media, dan data hubungan media dengan ideologi komunitas masyarakat Dimana media tersebut tinggal (Shoemaker and Reese 2013; Salaudeen 2021). Penelitian ini sendiri hanya mengelola data bingkai berita sehingga terdapat kesulitan dalam menarik Kesimpulan mengenai faktor lain yang membuat media seperti Kompas, Jawapos, berada disisi menyalahkan pemerintah, sedangkan Detik mengambil posisi "apa adanya", memberitakan sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan dari reportase di lapangan.

Meskipun demikian, dengan pertimbangan akademikal dan studi iteratur pengalaman kerja media dalam proses demokrasi Indonesia dalam dekade terakhir. Dimana salah satunya adalah menampilkan pengaruh ekonomi-politik media dalam proses kontrol demokrasi dan keberpihakan media pada peristiwa demokrasi. Bisa ditarik asumsi akademis bahwa perbedaan ketiga media dalam membingkai peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika, dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik media masing-masing.

Mengelaborasikan temuan-temuan di atas, bagaimana media menjaga peranannya sebagai alat kontrol demokrasi sangat dipengaruhi oleh peristiwa politik dan bagaimana ekonomi politik media bekerja dalam ruang diskusi antara kepentingan rakyat sebagai tuan demokrasi dan kepentingan politik ekonomi media yang menghidupi media dalam gejolak perubahan jaman.

SIMPULAN

Hasil pembingkaian dan diskusi kajian terhadap peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, telah memberi gambaran bagaimana kerja kontrol media terhadap proses demokrasi di era baru jurnalistik. Meskipun muncul tantangan perubahan teknologi, disrupsi informasi, hingga perubahan pada ekonomi politik media. Media tetap menjaga "marwahnya" sebagai alat kontrol sosial bagi demokrasi. Hasil bingkai ketiga media terhadap peristiwa, menunjukan bagaimana "sisi keberpihakan kepada rakyat" masing-masing media. Hal ini diperlihatkan melalui bingkai ketiga media yang memastikan Pemilu 2024 harus dijalankan dengan proses demokrasi yang jujur dan adil tanpa intervensi. Namun cara baca kontrol sosial modern tidak bisa dibaca apa-adanya. Karena konstruksi pembingkaian pemilu 2024 jujur dan adil, sangat dipengaruhi bagaimana faktor ekonomi-politik media melakukan "twist/pembengkokan" pada proses kontrol sosial tersebut. Singkatnya kontrol sosial terhadap demokrasi masing-masing media akan sangat berbeda bergantung bagaimana peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan praktik ekonomi-politik masing-masing media. Hasil bahwa detik punya kecenderungan membingkai apa adanya momen kontrol sosialnya, sedangkan Kompas dan Jawapos meletakan pemerintah pusat sebagai penanggun jawab utama guncangan demokrasi Pemilu 2024, adalah hasil dari bagaimana politi-ekonomi media bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Andhi Dwi Setiawan, and Pythag Kurniati. 2024. "Guru Besar Dan Alumni Unair Kecam Segala Praktik Pelemahan Demokrasi." 2024.

Andhi Dwi Setiawan, Pythag Kurniati. 2024. "Deklarasi Guru Besar Unesa, Inginkan Pemilu Tetap Pada Koridor Etik Dan Demokrasi Sehat." 2024.

Aprianto, Dimas Nur. 2024. "Aksi Unair Memanggil, Tujuh Guru Besar Turun Gunung Di Surabaya." 2024.

Bagus Supriadi, Pythag Kurniati. 2024. "Guru Besar Unej Minta Jokowi Hentikan Politisasi Kebijakan Yang Bisa Merusak Demokrasi." 2024.

Beckerle, Hana, Rachel Finston, and Benjamin Sussman. 2020. “Social Media Debate Position 1: Against the Use of Social Media as a Credible Source of Information.” *Internet Reference Services Quarterly* 25 (1–2): 25–35. https://doi.org/10.1080/10875301.2021.1937438.

Carter, Janae, and Benjamin Shields. 2020. “Social Media Debate Position 3: Social Media as a Credible Source of Information.” *Internet Reference Services Quarterly* 25 (1–2): 49–54. https://doi.org/10.1080/10875301.2021.1940411.

CIPG. 2015. “Tentang Media Dan Demokrasi.” *Cipg* 4: 52.

Devi, Aprilia. 2024. “Sivitas Akademika Untag Surabaya Nyatakan Sikap Tolak Politik Dinasti.” 2024.

Dewan Pers, and UMN. 2024. “LANSKAP MEDIA PERS Di INDONESIA Dasar Pemikiran,” no. June: 1–8.

Emeraldien, Fikry Zahria, Rahma Sugihartati, and Titik Puji Rahayu. 2021. “Inaccuracy within Online Journalism in Indonesia.” *Jurnal The Messenger* 13 (2): 179. https://doi.org/10.26623/themessenger.v13i2.1011.

Eriyanto. 2013. *Analisis Framing*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gupta, Bahana Patria. 2024. “Pernyataan Sikap Akademisi Di Surabaya Terkait Kontestasi Pemilu.” 2024.

Hallin, Daniel C. 2005. *We Keep America on Top of the World*. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203977477.

Hariyadi, Taufan. 2018. “Runtuhnya Pilar Demokrasi, Politik Kuasa Media Partai Perindo Di MNC Grup.” In *DiMCC Conference Proceeding*, 1:110–30.

Haryanto, Ignatius, and AMSI. 2021. “Survey on Cyber Media Condition in Indonesia.” *Indonesia Digital Media Landscape Report*.

Hawa Shofurani. 2024. “Demokrasi, Governance, Dan Oligarki: Konglomerasi Media MNC Group Keterlibatannya Melancarkan Capres Ganjar Pranowo Pada Pemilu 2024.” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16 (2): 108–16. https://doi.org/10.32734/politeia.v16i2.14537.

Hutomo, Cahyo. 2023. “Optimalisasi Peran Media Dalam Pemberitaan Pemilu Guna Meningkatkan Kualitas Demokrasi.” *LEMHANNAS RI*. Vol. 13.

Juarez Miro, Clara, and Jonathan Anderson. 2024. “Correcting False Information: Journalistic Coverage During the 2016 and 2020 US Elections.” *Journalism Studies* 25 (2): 218–36. https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2293830.

Jumbadi, Serly Putri. 2024. “Jelang Pemilu, Rektor-Ketua Kampus Katolik Dorong Pemerintah Junjung Etika.” 2024.

Lestari, Puji, and Suranto Suranto. 2018. “Media Online Sebagai Pilar Kelima Demokrasi (Analisis Wacana Pada Petisi Online Terpopuler Periode Januari – Desember 2017 Di Change.Org).” *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1). https://doi.org/10.21831/lektur.v1i1.12625.

Mulyono, Yakub. 2024. “Ratusan Mahasiswa-Dosen Unej Nyatakan Sikap: Politik Dinasti Cederai Pemilu.” 2024.

Pembayun, Jaduk Gilang. 2015. “Konglomerasi Media Dan Dampaknya Pada Pilpres 2014.” *Jurnal Interaksi* 4 (2): 109–16.

Prasetyo, Stanley Adi, Yadi Hendriana, Tri Agung Kristanto, Bestian Nainggolan, A Sapto Anggoro, Wahyu Dhyatimika, Lintang Ratri Rahmiadji, and Winarto. 2023. “Pers Di Tahun Politik” 25: 10–17.

Pratiwi, Ellya, and Kuskridho Ambardi. 2020. “Performa Jurnalisme Online Dan Kecenderungan Politainment Dalam Berita Pilpres 2019.” *Jurnal Studi Jurnalistik* 2 (1): 25–44. https://doi.org/10.15408/jsj.v1i2.14601.

Rusli, I, S Ahdan, and M Idris. 2022. “Analisis Framing Konstruksi Pemberitaan Presiden Jokowi Terkait Persiapan Pemilu 2024 Di Media Kompas. Com Dan Republika. Co. Id.” *Respon Jurnal Ilmiah …*, 160–68.

Salaudeen, Mistura Adebusola. 2021. “From Personal to Professional: Exploring the Influences on Journalists’ Evaluation of Citizen Journalism Credibility.” *Journalism Practice* 0 (0): 1–24. https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1892517.

Shoemaker, Pamela J., and Stephen D. Reese. 2013. *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. 3rd ed. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203930434.

Singgih Wiryono, Ihsanuddin. 2024. “Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Minta Jokowi Junjung Tinggi Etika.” 2024.

Slamet, Adiyana. 2016. “Media Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6 (1): 121–121.

Sumarkidjo, Atmadji. 2013. “Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya Yang Konsisten Anti-Korupsi.” *Jurnal Visi Komunikasi* 12 (1): 65–81.

Vicki Febrianto. 2023. “Pengamat Sebut Jawa Timur Barometer Penentu Pemilu 2024,” 2023.

Vos, Tim P., Martin Eichholz, and Tatsiana Karaliova. 2019. “Audiences and Journalistic Capital: Roles of Journalism.” *Journalism Studies* 20 (7): 1009–27. https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1477551.

Waisbord, Silvio. 2018. “Truth Is What Happens to News: On Journalism, Fake News, and Post-Truth.” *Journalism Studies* 19 (13): 1866–78. https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881.

Wardani, Ayu, Dede Suprayitno, and Ratu Nadya Wahyuningratna. 2023. “Framing Pemberitaan Calon Presiden Pada Media Online CNNIndonesia.Com Dan Kompas.Com.” *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6 (1): 54–79. https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1181.

Wibawa, Darajat. 2020. “Wartawan Dan Netralitas Media.” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4 (2): 185–206. https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.10531.

Widiyana, Esti. 2024a. “120 Sivitas Akademika Unair Kritik Keras Pemerintahan Jokowi.” 2024.

———. 2024b. “Sivitas Akademika Unesa Sampaikan 6 Poin Sikap Respons Dinamika Politik.” 2024.

Widyanningtyas, Mia Dwianna. 2022. “Idealisme Wartawan Dalam Pusaran Bisnis Media: Runtuhnya Dinding Api.” *Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*, no. July: 165–76. https://doi.org/10.37535/20320220111.

Wolfgang, J. David, Tim P. Vos, and Kimberly Kelling. 2019. “Journalism’s Relationship to Democracy: Roles, Attitudes, and Practices.” *Journalism Studies* 20 (14): 1977–94. https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1547123.

Wolfgang, J. David, Tim P. Vos, Kimberly Kelling, and Sooyoung Shin. 2021. “Political Journalism and Democracy: How Journalists Reflect Political Viewpoint Diversity in Their Reporting.” *Journalism Studies* 22 (10): 1339–57. https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1952473.

Yamamoto, Masahiro. 2011. “Mass Media as a Macrolevel Source of Social Control: A New Direction in the Community Structure Model.” *Mass Communication and Society* 14 (6): 820–37. https://doi.org/10.1080/15205436.2011.608178.

2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review Pertama (28 November 2024)

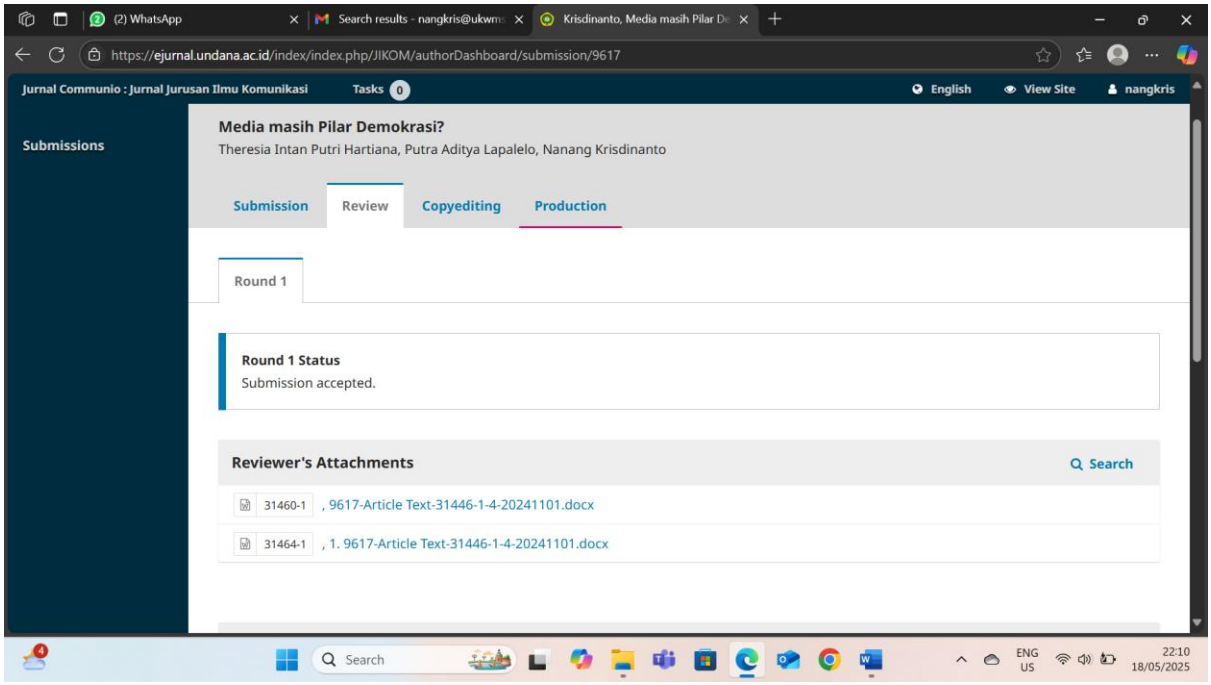

3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit (10 Desember 2024)

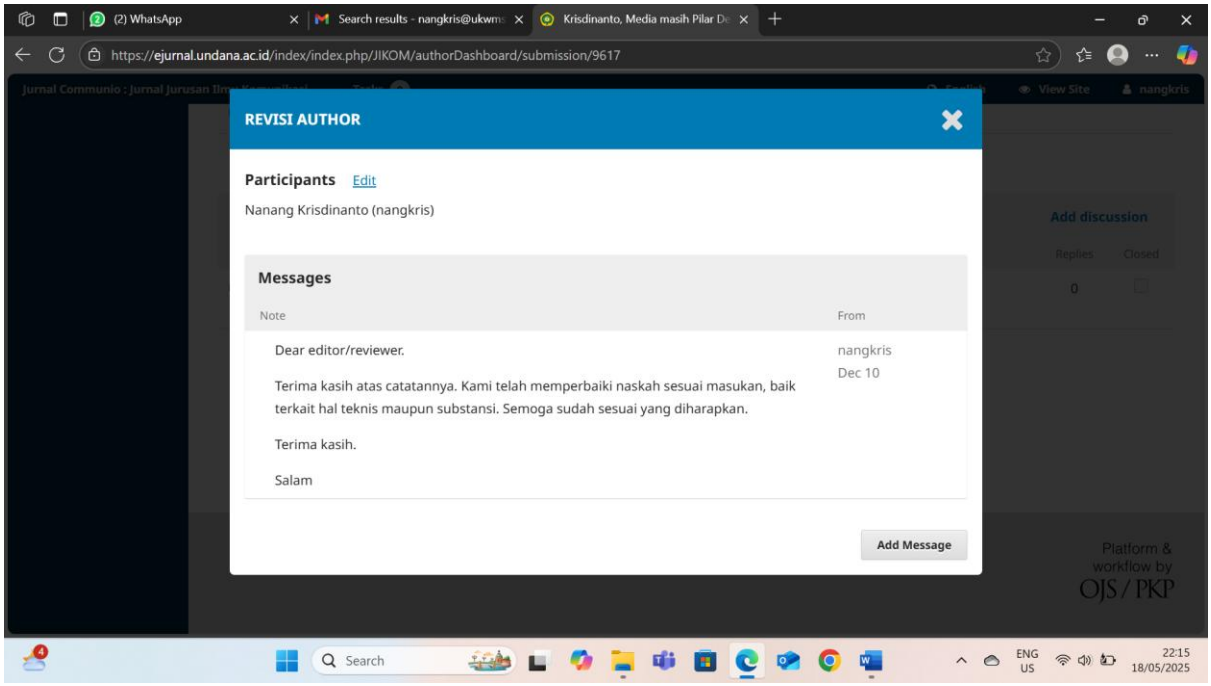

Respon kepada Reviewer

No.	Masukan Reviewer	Respon
1.	Panjang tulisan maksimal 5000 kata sesuai pedoman penulisan. Mohon baca pedoman	Sudah disesuaikan panjang naskahnya.
2.	Ini terkesan rumusan tujuan penelitian kuantitatif? Diksi tujuan “Mempengaruhi” mempunyai implikasi pd pemilihan metode penelitian. Dalam hal ini butuh pisau analisis utk mengukur apakah A mempengaruhi B dst. Penelitian kualitatif tdk bs mengukur pengaruh A ke B dst. Mohon perbaiki	Rumusan masalah sudah diubah menjadi bernuansa kualitatif.
3.	Bagian ini seharusnya berisi gambaran metode penelitian yg digunakan. Intro jgn terlalu panjang lebar.	Intro di metode sudah dipadatkan. Langkah operasional penelitian sudah lebih ditonjolkan.

4.	Sesuaikan abstrak dengan perubahan di abstrak bahasa. Mohon terjemahannya dibuat lebih baik (English advance)	Bahasa Inggris di abstrak sudah diperbaiki dengan standar akademik.
5.	Pastikan Citasi style menggunakan APA	Sudah disesuaikan.
6.	Perhatikan catatan typo error dan perbaiki semua	Sudah disesuaikan.
7.	Gambar yang mana?? Gambar 1 atau 2? Sebutkan angkanya. Sebutkan nomor gambar.	Nomor gambar sudah diperbaiki semuanya.
8.	Harap dijelaskan lebih detail ttg penggunaan metode penelitian. Unit analisis kenapa Nov 2023- Feb 2024. Apa pertimbangannya. Mohon dijelaskan. Ada berapa beria??? Trus adakah cara pengambilan sampel berita? Caranya bagaimana? Jelaskan. Prosedur analisis data juga mohon dielaborasi lagi.	Pilihan unit analisis sudah lebih ditegaskan, yaitu memilih pemberitaan di masa isu ini sedang mencapai puncaknya di media massa. Berita dipilih secara purposiveyang berkesusaian dengan Langkah metode Entman. Prosedur analisis juga sudah lebih dioperasionalkan dengan mengaitkan Langkah metode dengan data yang diperoleh.
9.	Perlu membandingkan kembali antara hasil penelitian anda dgn penelitian sejenis yg anda cantumkan di bagian pendahuluan. Perlu melakukan elaborasi teori. Gunakan salah satu teori komunikasi. Misalnya teori Konstruksi Sosial utk menjelaskan bagaimana perspektif teori dpt menjelaskan fenomena ini.	Di bagian analisis sudah ditambahkan jurnal jurnal penelitian serupa terkait framing media di Indonesia. Penjelasan teori konstruksi sosial juga sudah dipertajam dengan menambahkan jurnal terkait teori konstruksi sosial pemberitaan.
10.	Harap gunakan 80% dari sumber primer (Jurnal, atau prosiding)	Komposisi sumber sudah disesuaikan dengan penambahan sumber primer terutama jurnal.

4. Bukti konfirmasi artikel accepted

(28 Desember 2024)

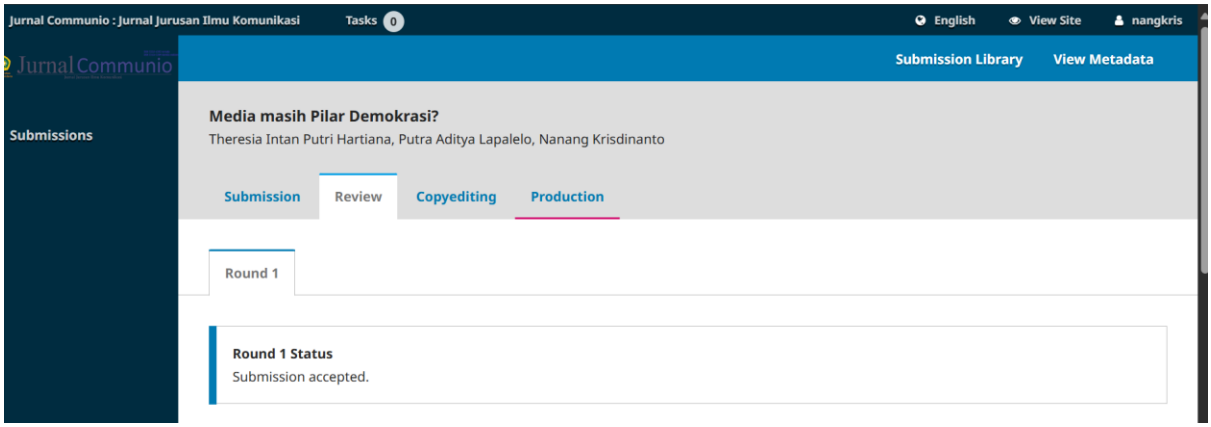

5. Bukti konfirmasi artikel published online (29 Januari 2025)